

**ANALISIS PPh 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI  
DI PERUM PERHUTANI KBM INK SURABAYA**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian**

**Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi**

**Program Studi Akuntansi**



**OLEH :**

**WHISNU PRAMADHANA WICAKSANA**

**NIM : 2011410596**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2014**

## PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Whisnu Pramadhana Wicaksana  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Februari 1993  
NIM : 2011410596  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma III  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis PPh 21 Terhadap Penghasilan  
Pegawai di Perum Perhutani KBM INK  
Surabaya

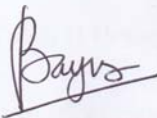
Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

Co Dosen Pembimbing

Tanggal : 13 - 03 - 2014

Tanggal : 18 - 03 - 2014



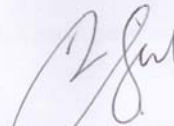
Bayu Sarjono, SE., Ak., M., Ak., CA., BKP



Putri Wulanditya, SE., M. Ak.

Ketua Program Diploma

Tanggal : 13 - 03 - 2014



Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA., BKP., SAS., CA

## **1. Latar Belakang Masalah**

Istilah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak sangat penting sebagai sumber penerimaan kas negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari beberapa macam pasal, salah satunya adalah PPh pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tujuan penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan 21 pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.
2. Mengetahui penyetoran pajak penghasilan 21 pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.
3. Mengetahui pelaporan pajak penghasilan 21 pada Perum Perhutani KBM INK Surabaya.

## **2. Subyek Pengamatan**

Perum Perhutani KBM INK adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) sebagai pengelola sumberdaya hutan di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Perum Perhutani KBM INK memiliki beberapa karyawan yang masuk dalam kategori Penghasilan Kena Pajak. PPh pasal 21 yang dikenakan kepada karyawan ditunjang oleh pihak perusahaan sehingga menimbulkan utang pajak bagi perusahaan pada saat pembayaran gaji kepada pegawai. Permasalahan yang muncul adalah tentang bagaimanakah perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 Perum Perhutani KBM INK.

## **3. Pembahasan**

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perum Perhutani KBM INK Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perum Perhutani KBM INK Surabaya ditunjang oleh Perum Perhutani KBM INK Surabaya. Namun untuk perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan menggunakan tarif pemotongan dikenakan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) berdasarkan UU PPh.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menyetorkan pembayaran pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut :

1. Pegawai diharapkan memiliki nomor NPWP

2. Perusahaan dapat menghitung sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang.
3. Setelah perusahaan menghitung berapa besarnya pajak yang ditetapkan maka perusahaan dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Perusahaan membayar pajak atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan.
5. Perum Perhutani KBM INK Surabaya menggunakan bank BNI sebagai tempat pembayaran pajak.
6. Lalu Perum Perhutani KBM INK Surabaya melaporkan kepada kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 terutang untuk pegawai yang berpenghasilan kena pajak di tunjang oleh perusahaan. Jika pajak penghasilan lebih besar dari tunjangan pajak penghasilan maka pajak penghasilan dikurangi dengan tunjangan pajak penghasilan lalu di potong langsung dari penghasilan pegawai oleh Perum perhutani KBM INK Surabaya.

Pajak penghasilan Pasal 21 Perum Perhutani KBM INK Surabaya biasanya setorkan melalui bank dan di setorkan oleh bagian *accounting* sekaligus dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Pembayaran di Perum Perhutani dilakukan setiap bulan. Rata-rata Perum Perhutani KBM INK Surabaya membayar pajak kurang dari tanggal 10 bulan berikutnya. Namun ada saat penyetoran yang melebihi dari tanggal 10 bulan

berikutnya. Sanksi keterlambatan penyetoran yaitu bunga sebesar 2% dari besarnya PPh Pasal 21 yang terutang.

Perum Perhutani KBM INK Surabaya melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Final atas pesangon pegawai. PPh Final ini terjadi karena ada nya pegawai yang pensiun atau uang pesangon untuk pegawai yang mau pensiun di Perum Perhutani KBM INK Surabaya. Di Perum Perhutani KBM INK Surabaya untuk pembayaran PPh Final atas pesangon pegawai tersebut ditunjang oleh Perum Perhutani KBM INK Surabaya. Jadi untuk pesangon pegawai yang ingin pensiun di Perum Perhutani KBM INK Surabaya tetap utuh sebesar pesangon yang di berikan oleh Perum Perhutani KBM INK Surabaya tanpa di potong langsung oleh PPh Final untuk pesangon.

#### **4. Kesimpulan**

Terdapat beberapa kesimpulan dari Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan di Perum Perhutani KBM INK Surabaya ialah sebagai berikut :

1. Di Perum Perhutani KBM INK terdapat tunjangan untuk PPh Pasal 21 pegawai, tetapi besarnya tidak sesuai dengan PPh Pasal 21 yang terutang.
2. Perum Perhutani KBM INK Surabaya telah melakukan penyetoran pajak dengan benar, namun ada terjadi keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang.
3. Ditemukan SSP PPh Pasal 21 Final untuk pesangon pegawai yang mau pensiun di Perum Perhutani KBM INK Surabaya.

4. PPh Pasal 21 Final pesangon pegawai ditunjang oleh Perum Perhutani KBM INK Surabaya, sehingga nilai pesangon pegawai tersebut di gross up terlebih dahulu sebelum dihitung dengan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon.
5. Jadi uang pesangon pegawai di Perum Perhutani KBM INK Surabaya tidak di potong dari pesangon pegawai tersebut atau tetap utuh sesuai besar pesangon yang telah diberikan oleh Perum Perhutani KBM INK Surabaya.

## **5. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah ditarik maka dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan dapat melakukan pengarsipan dokumen mengenai dokumen-dokumen berkaitan perpajakan di perusahaan, agar jika data tersebut dibutuhkan tidak kesulitan untuk mencarinya dokumennya.
2. Agar Perum Perhutani KBM INK Surabaya membayar PPh Pasal 21 sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran.
3. Perlu adanya pemeriksaan terhadap dokumen SPT dari Perusahaan.
4. Perlu adanya pemeriksaan terhadap dokumen SPP dari Perusahaan.
5. Perusahaan dapat melaporkan SPT Masa sebelum batas tanggal terakhir pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

Diaz priantara. 2012. Perpajakan Indonesia. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta. 2012

Mardiasmo. 2012. Perpajakan Edisi Revisi 2011. 2011. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

Undang-undang pajak lengkap tahun 2013. Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media.2013.

Waluyo.2012. Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta.